

**Rekomendasi Konferensi Nasional  
e-Indonesia Initiative 2006  
Bandung, 04 Mei 2006.**

1. Presiden RI dan Departemen terkait (Kominfo, Ristek, Perindustrian, Perdagangan) melakukan inisiatif dan *leadership* dalam membangun infrastruktur TIK yang murah dan industri manufaktur, aplikasi, konten dan jasa yang antara lain melalui kegiatan:
  - a. Menjadikan TIK sebagai arus utama pembangunan nasional
  - b. Membangun kawasan khusus, industri TIK terpadu di seluruh Indonesia.
  - c. Mengundang investor asing dengan insentif khusus sebagai *industry enabler*, untuk mencapai kandungan lokal yang maksimal.
  - d. Merencanakan dan membangun Industri pendukung yang mutlak diperlukan untuk terjadinya iklim industri manufaktur dengan standar global.
  - e. Menyediakan adanya "playing grounds" (tempat menguji hasil inovasi) sebagai usaha untuk peningkatan kemampuan industri TIK dalam negeri.
  - f. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam bisnis TIK dan mencegah kriminalisasi penerapan TIK
  - g. Menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang dan Jasa dalam bidang TIK untuk meningkatkan kandungan lokal.
2. Presiden agar mengambil inisiatif untuk membentuk CIO (Chief Information Officer) di instansi/lembaga pemerintah maupun BUMN menuju masyarakat Indonesia berbasis informasi.
3. Presiden agar segera menetapkan kebijakan nomor identitas nasional sebagai nomor unik dan melekat pada pribadi, yang digunakan sebagai acuan untuk menghubungkan sumber data dari berbagai instansi.
4. Depkominfo, Deperin dan Kementerian Ristek agar melakukan inisiatif dan *leadership* dalam eksekusinya untuk beberapa hal utama, yaitu:
  - a. Penyusunan *Roadmap* TIK Indonesia yang berlandaskan pada sasaran pembangunan TIK jangka pendek, menengah dan panjang, beserta *milestone* dan tolok ukurnya.
  - b. Menata kembali Regulasi dan Standardisasi TIK yang kondusif, adil, praktis dan proaktif terhadap potensi perkembangan teknologi serta mengacu pada *roadmap* TIK Indonesia yang telah disepakati.
  - c. Mereview dan Menata kembali kebijakan USO, yang lebih efektif dan kondusif serta melibatkan segenap penyelenggara jasa/jaringan, dengan tujuan menjawab masalah *digital divide* dengan memaksimalkan kandungan lokal.

- d. Melakukan fokus dalam mendukung pengembangan program belajar TIK, seperti OSOL.
  - e. Melakukan usaha yang lebih konkrit dan fokus untuk implementasi e-government di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, dimulai dari penerapan e-leadership dan organisasi pendukungnya.
5. Depkominfo, Depdiknas, Deperin, Depdagri, Depnaker dan Kementerian Ristek agar melakukan tindakan yang lebih proaktif dalam mengembangkan potensi SDM secara nasional di segala lapisan masyarakat dalam bidang TIK yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Melakukan inisiatif dengan leadership yang kuat dalam membangun masyarakat yang memiliki budaya Litbang.
  - b. Mengembangkan sinergi antara Dunia Akademis, lembaga litbang, Industri dan Pemerintah untuk melakukan *litbang* di seluruh wilayah Indonesia.
  - c. Melakukan koordinasi dan mengatur Industri agar melaksanakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) nya dalam bidang TIK.
  - d. Mengundang perusahaan TIK global untuk melakukan kegiatan litbang di Indonesia dengan melibatkan SDM nasional.
  - e. Menerapkan standard kompetensi untuk pengembangan SDM TIK
  - f. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kepedulian (awareness), kesiapan (readiness) dan budaya TIK masyarakat.

Tim Perumus:

- 1.Brata T Hardjosubroto – SVP Indosat, PresDir IndosatM2
- 2.Hadi Suwastio – Chairman Wireless Comms Res Center STTTel
- 3.Marzan Aziz Iskandar – Deputy Chairman TIEML BPPT
- 4.Setyanto P.Santosa – Ditjen Kebudayaan KomInfo
- 5.Indar P – PresDir LintasArta
- 6.Suhono HS – Charman IT Research Center ITB
- 7.Cahyana Ahmadjayadi – Dirjen Aptel DepKomInfo